

CERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Sylvia*)

***Abstract:** Financial reporting is one of the important information to describe the financial condition of the area. Transparent and accountable local government would make adequate voluntary disclosure to the public about government performance. This research is limiting itself to compulsory taxes and charges, as well as investors and creditors. The reason is that the general public as taxpayers would like to know the local tax revenue realization that they have to pay and follow-up of local government in managing the tax proceeds. Investors are parties to invest their funds in local government, and the current government is encouraged to attract investors to work together with local government to local governments in developing regions are not only dependent on central government funding*

***Keywords:** transparency, public accountability, website*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terbukanya saluran komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sangat membantu pihak pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Saat ini, masyarakat lebih bebas dalam menyampaikan aspirasinya namun demikian transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah daerah masih terasa sangat minim. Masyarakat seringkali baru menyadari bahwa terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah atau pada instansi pemerintah, ketika terjadi insiden yang menyeret pejabat atau mantan pejabat duduk sebagai terdakwa kasus korupsi.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu informasi penting yang dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah. Pemda yang transparan dan akuntabel tentu akan membuat pengungkapan sukarela yang memadai kepada masyarakat mengenai kinerja pemda. Audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pintu masuk untuk mengetahui pengelolaan keuangan pemda. Oleh karena itu, BPK memperkenalkan sistem pemeriksaan berbasis elektronik (e-audit). Sistem ini memudahkan BPK untuk memonitor

Rp4.450 triliun aset negara yang dikelola oleh berbagai instansi. Secara nasional, e-audit diharapkan terimplementasi pada 2013. Melalui e-audit, BPK berharap dapat menekan penyelewengan minimal 30% (www.bpk.go.id).

Pengguna pelaporan keuangan pemerintahan diidentifikasi oleh Mardiasmo (2004) ada sebanyak sepuluh pihak, yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor dan kreditur, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) karyawan/pegawai, (6) pemasok/rekanan (*vendors*), (7) legislatif, (8) pemerintah daerah dan jajarannya, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (auditor). Secara umum, pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah, bukan hanya untuk pihak intern (pemerintah daerah dan jajarannya, beserta pegawai negeri sipil) tapi juga untuk pihak ekstern (masyarakat umum sebagai pembayar pajak, auditor, investor, kreditur, dll). Untuk pihak ekstern, salah satunya adalah auditor, e-auditor akan membantu untuk melakukan akses terhadap informasi yang terkait dengan laporan keuangan pemda. Namun, pihak ekstern lainnya yaitu masyarakat umum, investor, dan kreditur masih sangat terbatas informasi yang mereka dapat peroleh. Salah satu media yang dapat

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendesiminasikan informasi adalah melalui website. Instruksi Mendagri 188.52/17978/SJ tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah merupakan dasar hukum untuk melakukan transparansi atas pengelolaan anggaran. Pengungkapan atas informasi yang lebih luas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut pengungkapan yang bersifat sukarela (Puspita dan Martani, 2012).

Penelitian ini membatasi pembahasannya pada wajib pajak dan retribusi daerah, serta investor dan kreditur. Alasannya, bahwa masyarakat umum sebagai pembayar pajak tentu ingin mengetahui realisasi penerimaan pajak daerah yang telah mereka bayarkan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam mengelola dana hasil pajak. Investor merupakan pihak yang menanamkan dananya di pemerintah daerah, dan saat ini pemerintah daerah didorong untuk menarik investor agar bersinergi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dalam membangun daerahnya tidak hanya tergantung pada dana dari pemerintah pusat. Kreditur juga merupakan pihak penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, sebab beberapa kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan dengan pengucuran dana dari kreditur.

Rumusan Masalah

Merujuk dari uraian sebelumnya, maka penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: “apakah transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah telah tercermin melalui website pemerintah daerah sebagaimana yang dibutuhkan oleh investor, kreditur, serta wajib pajak dan retribusi daerah?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah dalam memberikan pengungkapan

sukarela melalui website resmi pemerintah daerah terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh investor, kreditur, serta wajib pajak dan retribusi daerah.

REVIEW LITERATUR

Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Transparansi menghendaki adanya kejujuran dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diberi amanat untuk mensejahterakan rakyat dengan memperhatikan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan sosial bagi masyarakatnya. Dari hal tersebut, maka tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah perlu disampaikan pencapaiannya kepada masyarakat agar tercipta kepercayaan timbal balik antar-pemangku kepentingan. Transparansi mengandung arti jujur dalam menyampaikan informasi atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penegakan transparansi dicapai dengan melakukan akuntabilitas publik. Akuntabilitas berarti menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik mengenai pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Pelaporan Keuangan

Untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah terlebih dahulu harus memahami informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan hal yang lebih luas dari sekadar laporan keuangan. Pelaporan keuangan menjadi sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono, 2006). Martiningsih (2012) menguji informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan

keuangan pemerintah daerah dan menemukan bahwa: informasi kondisi keuangan, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan anggaran, serta informasi naratif diperlukan oleh masyarakat dari laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan yang peneliti anggap penting adalah masyarakat pembayar pajak, investor, dan kreditur. Dengan pertimbangan bahwa pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu diutamakan agar suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Investor merupakan pihak yang dapat memberikan sinergi kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya tanpa harus tergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sedangkan kreditur merupakan pihak yang dapat membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan programnya dengan ikatan perjanjian dalam kurun waktu tertentu.

Yentifa et al. (2010) menemukan hasil bahwa sepuluh informasi yang paling dibutuhkan oleh investor dan kreditur adalah: (1) kebijakan pemerintah di bidang investasi, perpajakan, perbankan, serta ekspor impor; (2) potensi unggulan daerah; (3) evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah, seperti pelayanan perizinan dan tarifnya; (4) ketersediaan infrastruktur; (5) stabilitas keamanan; (6) stabilitas politik; (7) perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan; (8) prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah; (9) trend ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang; dan (10) kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengungkapan Sukarela

Informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pelaporan keuangannya telah diatur dalam Permen-

dagri No. 13 tahun 2006 dan PP 71 tahun 2010. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi diluar yang diharuskan oleh peraturan pemerintah. Pengungkapan sukarela menyangkut kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat, dengan demikian menunjukkan kesediaan pemerintah daerah untuk bersikap transparan dan akuntabel. Pengungkapan sukarela akan memberi nilai tambah kepada pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Fitri (2011) menemukan bahwa pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ataupun wajar dengan pengecualian (WDP) memberikan pengungkapan yang relatif sama. Justru daerah yang memiliki opini *Disclaimer* memiliki pengungkapan yang lebih baik daripada daerah yang memperoleh opini WTP. Jadi, opini dari BPK tidak menjadi jaminan bahwa pemerintah daerah baik atau buruk dalam memberikan pengungkapan pelaporan keuangannya.

Pengungkapan Informasi melalui Website Pemda

Agar pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat lebih luas dijangkau dan kapan saja, maka pemerintah daerah dapat menampilkan pelaporan keuangannya melalui media website yang dikelola oleh pemerintah daerah. Puspita dan Martani (2012) menyimpulkan bahwa pemerintah daerah telah mulai mengadopsi *e-government* dengan memberi pengungkapan sukarela yang cukup memadai melalui website pemerintah daerah. Mereka juga menyampaikan bahwa besarnya pendapatan asli daerah dan belanja daerah ternyata tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan sukarela di website pemerintah daerah.

Sebagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat, maka website pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya masyarakat dapat menyam-

paikan aspirasinya melalui website tersebut (Anggrahini et al., 2008). Puspita dan Martani (2012), meneliti informasi yang dipublikasikan melalui website pemerintah daerah meliputi: informasi yang terkait dengan pembangunan daerah, profil daerah, tokoh daerah, perundangan, *time-liness*, pariwisata, pelayanan, kependudukan, keuangan, kontak dan informasi lain.

Informasi yang ditampilkan dalam website pemerintah daerah diharapkan dapat berguna bagi investor, kreditur, serta pembayar pajak dan retribusi daerah. Kandungan informasi yang harus ada dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah telah diatur dalam PP 24/2005 (diperbarui dengan PP 71/2010) dan Permendagri. 13/2006 (diperbarui dengan Permendagri 21/2011). Dari PP 24/2005 dan Permendagri 13/2006, Yentifa et al. (2010) dan Martiningsih (2012) menyatakan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah meliputi: kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, kinerja Pemda, perencanaan dan penganggaran, serta informasi naratif. Martiningsih (2012) mengkaji 30 butir informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dan membandingkannya dengan yang disyaratkan oleh PP 24/2005 dan Permendagri 13/2006. Hasilnya, ditemukan bahwa PP 24/2005 baru memenuhi 56,67% dari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan Permendagri 13/2006 telah mengharuskan sebanyak 73,33% dari total kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan survei terhadap investor dan kreditur yang ada di Sumatera Barat, Yentifa et al. (2010) menguji sebanyak 43 jenis informasi dan hasilnya sebanyak 86,54% responden menyatakan bahwa informasi kebijakan pemerintah di bidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor merupakan informasi yang paling dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengembangkan hasil yang diperoleh Yentifa et al. (2010) dengan memasukkan pengguna pelaporan keuangan pemda yang penting lainnya yaitu wajib pajak dan retribusi daerah. Seiring dengan otonomi daerah, maka kemandirian daerah menjadi hal yang penting untuk mengukur kinerja dari pemerintah daerah. Kemandirian daerah diukur dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD. Sedangkan komponen yang utama dari PAD adalah pajak dan retribusi daerah. Kemandirian daerah sampai saat ini masih terbilang rendah yaitu berkisar 20% (Kristina, 2005). Penyebab rendahnya kemandirian daerah salah satunya adalah rendahnya edukasi pajak masyarakat akibat masyarakat kurang memahami hasil yang diperoleh pemerintah dari pajak dan alokasinya (Kristina, 2005). Oleh karena itu, sebagai media yang dapat dijangkau luas oleh wajib pajak dan retribusi daerah, maka melalui website, pemerintah daerah dapat transparan dalam menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif deskriptif. Studi eksploratif dilakukan ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kukuh (Sekaran, 2006). Pengolahan data menggunakan *content analysis*, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat nyata (Fitri, 2011).

Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu:

- a. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya,

- b. Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih,
- c. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis,
- d. Pendataan suatu sampel dokume yang telah dipilih dan melakukan pengkodean,
- e. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data,
- f. Interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kotamadya yang ada di Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kotamadya yang ada di Sulawesi Selatan. Peneliti mengambil sampel di wilayah tersebut dengan pertimbangan kemudahan memperoleh berita untuk kedua wilayah tersebut untuk memperkaya analisis atas hasil penelitian yang dilakukan.

Sumber Data

Data diperoleh dari sekunder berupa telaah literatur dan telaah dokumen. Telaah literatur dilakukan dengan menelaah penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini sedangkan telaah dokumen dilakukan dengan menganalisis website resmi yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Metode untuk menghitung indeks transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan indeks dengan *dichotomous score*, yaitu memberikan nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan.

Daftar informasi yang dianalisis pengungkapannya melalui website Pemda

mengacu pada Yentifa et al. (2010) untuk informasi yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur sedangkan informasi untuk wajib pajak dan retribusi daerah dikembangkan sendiri oleh peneliti. Berikut ini daftar informasi yang akan dianalisis:

1. Informasi untuk Investor dan Kreditur

a. Informasi Kondisi Keuangan

- 1) Posisi aktiva, hutang, dan aktiva bersih/ekuitas pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan
- 2) Prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan
- 3) Perubahan aktiva bersih/ekuitas
- 4) Rincian hasil operasional pemerintah daerah selama 1 periode pelaporan
- 5) Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)
- 6) Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
- 7) Rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah daerah
- 8) Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah

b. Informasi Kondisi ekonomi

- 1) Nilai dan potensi sumber daya yang dikelola pemerintah daerah
- 2) Prediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah
- 3) Pertumbuhan produk domestik bruto lima tahun terakhir
- 4) Perkembangan ekspor impor
- 5) Laju inflasi
- 6) Jumlah pengangguran terbuka
- 7) Pertumbuhan nilai investasi 5 tahun terakhir
- 8) Pendapatan perkapita penduduk
- 9) Dampak aktivitas operasional pemerintah daerah terhadap perekonomian

c. Informasi Kepatuhan terhadap aturan

- 1) Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan
- 2) Kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah
- 3) Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 4) Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran

d. Informasi Kinerja Pemda

- 1) Perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya
- 2) Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah, seperti pelayanan perizinan dan tarifnya
- 3) Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah daerah
- 4) Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemerintah daerah

e. Informasi Perencanaan dan penganggaran

- 1) Perencanaan pemerintah daerah 5 tahun ke depan
- 2) Perencanaan alokasi sumber daya
- 3) Trend ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang
- 4) Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah
- 5) Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan
- 6) Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah daerah

f. Informasi Naratif

- 1) Deskripsi sebelum laporan keuangan
- 2) Laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah daerah
- 3) Kondisi geografis
- 4) Kondisi demografis
- 5) Kebijakan pemerintah bidang investasi, perpajakan, ketenagakerjaan, perbankan serta kebijakan bidang ekspor dan impor
- 6) Ketersediaan infrastruktur
- 7) Potensi unggulan daerah
- 8) Stabilitas politik
- 9) Stabilitas keamanan

Untuk wajib pajak dan retribusi daerah:

g. Pajak dan retribusi daerah

- 1) Pajak dan retribusi daerah yang dikumpulkan
- 2) Peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah
- 3) Potensi pajak dan retribusi daerah
- 4) Anggaran pajak dan retribusi daerah
- 5) Realisasi pengumpulan pajak dan retribusi daerah

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Website Pemda

Penelitian ini mengambil sampel pemerintah daerah yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan. Propinsi Sulawesi Selatan memiliki 21 kabupaten dan 3 kotamadya. Ada empat kabupaten yang websitenya tidak dapat dibuka, disebabkan sedang dalam perbaikan, yaitu Bone dan Soppeng. Dua kabupaten belum memiliki website resmi, yaitu Bulukumba dan Jeneponto. Jadi, total sampel yang dianalisis sebanyak 17 kabupaten dan 3 kotamadya. Berikut ini daftar kabupaten dan kotamadya yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan beserta website resminya.

Tabel 1. Daftar Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kotamadya	Website Resmi Pemda
Kabupaten:	
1. Selayar	http://kepulauanelayarkab.go.id/
2. Bulukumba	(tidak ada website resmi)
3. Bantaeng	http://www.bantaengkab.go.id/
4. Jeneponto	(tidak ada website resmi)
5. Takalar	http://www.takalarkab.go.id/
6. Gowa	http://v2.gowakab.go.id/
7. Sinjai	http://www.sinjaikab.go.id/v1/home
8. Maros	http://www.maroskab.go.id/home
9. Pangkajene Kepulauan	http://www.pangkepkab.go.id/ http://www.barrukab.go.id/
10. Barru	(tidak dapat dibuka)
11. Bone	(tidak dapat dibuka)
12. Soppeng	http://www.wajokab.go.id/index.php
13. Wajo	http://www.sidenrengappangkab.go.id/
14. Sidenreng Rappang	http://www.pinrangkab.go.id/new/
15. Pinrang	http://www.enrekangkab.go.id/
16. Enrekang	http://luwukab.go.id/
17. Luwu	http://www.tanatorajakab.go.id/
18. Tana Toraja	http://www.luwuutara.go.id/
19. Luwu Utara	http://www.luwutimurkab.go.id/
20. Luwu Timur	http://www.torajautarakab.go.id/
21. Toraja Utara	
Kotamadya:	http://bahasa.makassarkota.go.id/index.php
1. Makassar	http://www.pareparekota.go.id/
2. Parepare	http://www.palopokota.go.id/
3. Palopo	

Sumber: Data diolah (2012)

Pengungkapan Informasi oleh Pemerintah Daerah

1. Informasi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan yaitu informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran, posisi keuangan, dan perubahannya, hasil operasional serta kebutuhan sumber keuangan unit pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Dengan diwajibkannya akuntansi atas pengelolaan keuangan daerah, maka laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dapat diandalkan sehingga dapat digunakan oleh berbagai pengguna laporan keuangan. Investor dan kreditur merupakan pihak yang sangat mementingkan kondisi keuangan. Informasi kondisi keuangan peme-

rintah daerah disediakan oleh akuntansi keuangan daerah sebagaimana yang diatur dari PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Output yang diperoleh dari akuntansi pemerintahan berupa: (1) neraca, yang menunjukkan posisi aktiva, utang, dan ekuitas, (2) laporan realisas anggaran, yang menunjukkan besarnya jumlah anggaran dan realisasi anggaran, (3) catatan atas laporan keuangan (CALK), berupa informasi yang memberikan penjelasan atas semua akun yang tercantum di laporan neraca dan laporan realisasi anggaran, dan (4) laporan arus kas, yang memberi informasi mengenai kas masuk dan kas keluar atas aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.

Tabel 2. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Kondisi Keuangan

	Informasi Kondisi Keuangan								Jumlah
	1.a.	1.b.	1.c.	1.d.	1.e.	1.f.	1.g.	1.h.	
Pemda yang Mengungkapkan Tingkat Pengungkapan	2	1	1	3	2	1	1	4	15
									9%

Sumber: Data diolah (2012)

Tabel 3. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Kondisi Keuangan

No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan	No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan
1	Sidrap	100%	11	Pangkep	0%
2	Takalar	38%	12	Wajo	0%
3	Barru	25%	13	Pinrang	0%
4	Lutim	13%	14	Enrekang	0%
5	Palopo	13%	15	Luwu	0%
6	Selayar	0%	16	Tator	0%
7	Bantaeng	0%	17	Luwu Utara	0%
8	Gowa	0%	18	Toraja Utara	0%
9	Sinjai	0%	19	Makassar	0%
10	Maros	0%	20	Parepare	0%

Sumber: Data diolah (2012)

Dari tabel 3 terlihat bahwa hanya Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang yang lengkap menyajikan informasi kondisi keuangan. Sebanyak 15 pemerintah daerah tidak menyajikan sama sekali informasi kondisi keuangan. Dari tabel 3.a. diketahui bahwa laporan neraca (item 1.a.) hanya ditampilkan oleh Pemerintah Daerah Barru dan Sidenreng Rappang; Laporan Realisasi Anggaran (item 1.d.) hanya disediakan oleh Pemerintah Daerah Takalar, Sidenreng Rappang, dan Barru; sedangkan laporan arus kas (item 1.e) disediakan oleh Pemerintah Daerah Takalar dan Sidenreng Rappang. Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah (item 1.h.) ditampilkan oleh Takalar, Sidenreng Rappang, Luwu Timur, dan Palopo. Dari hasil tersebut didapat tingkat pengungkapan sebanyak 9%. Hasil ini masih sangat rendah. Hal ini tentu sangat disayangkan sebab Yentifa et al. (2010) dan Martiningsih (2012) menyatakan bahwa informasi kondisi keuangan penting bagi invest-

tor dan kreditur untuk pengambilan keputusan mereka. Bahkan laporan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas diwajibkan dalam PP 71/2010 dan Permendagri 13/2006. Peneliti percaya bahwa ketiga laporan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah sebab BPK mutlak memeriksa ketiga laporan tersebut untuk pemberian opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah namun tidak ditampilkan pada website mereka.

2. Informasi Kondisi Ekonomi

Informasi kondisi ekonomi yaitu informasi untuk menentukan dan memprediksi kondisi unit pemerintah daerah dan perubahan di dalamnya (Martiningsih, 2008). Kondisi ekonomi merupakan situasi yang mendorong pemerintah daerah menggerakkan roda perekonomian di daerahnya sehingga masyarakat, investor, dan kreditur mendapatkan manfaat dari kegiatan perekonomian tersebut.

Tabel 4. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Kondisi Ekonomi

	Informasi Kondisi Ekonomi									
	2.a.	2.b.	2.c.	2.d.	2.e.	2.f.	2.g.	2.h.	2.i.	Jumlah
Jumlah Pemda yang mengungkapkan	16	6	13	1	7	2	9	11	9	74
Tingkat pengungkapan										41%

Sumber: Data diolah (2012)

Tabel 5. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Kondisi Ekonomi

No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan	No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan
1	Takalar	78%	11	Makassar	33%
2	Gowa	78%	12	Selayar	22%
3	Maros	78%	13	Wajo	22%
4	Barru	78%	14	Pinrang	22%
5	Luwu Timur	78%	15	Bantaeng	11%
6	Sinjai	67%	16	Pangkep	11%
7	Sidrap	67%	17	Tator	11%
8	Palopo	67%	18	Luwu	0%
9	Enrekang	56%	19	Luwu Utara	0%
10	Parepare	44%	20	Toraja Utara	0%

Sumber: Data diolah (2012)

Informasi kondisi ekonomi lebih transparan disampaikan pada website pemerintah daerah dibandingkan informasi kondisi keuangan. Dari tabel 4.a., tingkat pengungkapan atas informasi kondisi ekonomi mencapai 41%. Informasi 2.a. yaitu potensi dan sumber jasa yang dikelola pemerintah daerah, diungkapkan oleh 16 pemerintah daerah, kemudian informasi produk domestik bruto lima tahun sebanyak 13 daerah, dan informasi pendapatan perkapita penduduk sebanyak 11 daerah. Ketiga informasi kondisi ekonomi ini ditampilkan pada

laporan pemerintah daerah dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS.

3. Informasi Kepatuhan terhadap Aturan

Informasi kepatuhan terhadap aturan yaitu informasi yang bermanfaat untuk memonitor kontribusi dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dengan actual apakah sesuai dengan aturan yang berlaku (Martiningsih, 2008). Pemerintah daerah sebagai entitas publik terikat pada berbagai aturan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Tabel 6. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Kepatuhan terhadap Aturan

	Informasi Kepatuhan terhadap Aturan				
	3.a.	3.b.	3.c.	3.d.	Jumlah
Pemda yang Mengungkapkan	1	2	1	7	11
Tingkat pengungkapan	14%				

Sumber: Data diolah (2012)

Tabel 7. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Kepatuhan terhadap Aturan

No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan	No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan
1	Sidrap	100%	11	Maros	0%
2	Enrekang	50%	12	Pangkep	0%
3	Takalar	25%	13	Wajo	0%
4	Sinjai	25%	14	Pinrang	0%
5	Barru	25%	15	Luwu	0%
6	Luwu Timur	25%	16	Tator	0%
7	Parepare	25%	17	Luwu Utara	0%
8	Selayar	0%	18	Toraja Utara	0%
9	Bantaeng	0%	19	Makassar	0%
10	Gowa	0%	20	Palopo	0%

Sumber: Data diolah (2012)

Dari Tabel 7. informasi kepatuhan terhadap aturan yang paling banyak diungkapkan adalah informasi perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran (item 3.d). Dari Tabel 7, hanya Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang yang mengungkapkan keempat informasi kepatuhan terhadap aturan. Tingkat pengungkapan atas informasi kepatuhan terhadap aturan hanya mencapai 14% dari total informasi yang seharusnya diungkapkan oleh pemerintah daerah pada websitenya.

4. Informasi Kinerja

Informasi kinerja yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Saat ini pemerintah daerah menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan atas capaian yang jelas dan terukur dari setiap program dan kegiatan yang diusulkan pada setiap tahun anggaran. Penerapan yang benar atas anggaran berbasis kinerja ini akan memudahkan pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan melihat efektivitas, efisiensi, dan ekonomi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 8. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Kinerja

	Informasi Kinerja				Jumlah
	4.a.	4.b.	4.c.	4.d.	
Jumlah Pemda yang Mengungkapkan	7	3	8	9	27
Tingkat pengungkapan	34%				

Sumber: Data diolah (2012)

Tabel 9. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Kinerja

No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan	No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan
1	Enrekang	100%	11	Gowa	0%
2	Takalar	75%	12	Pangkep	0%
3	Sinjai	75%	13	Wajo	0%
4	Maros	75%	14	Pinrang	0%
5	Barru	75%	15	Luwu	0%
6	Sidrap	75%	16	Tator	0%
7	Luwu Timur	75%	17	Luwu Utara	0%
8	Parepare	75%	18	Toraja Utara	0%
9	Selayar	50%	19	Makassar	0%
10	Bantaeng	0%	20	Palopo	0%

Dari tabel 6.a., informasi evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemerintah daerah (item 4.d) yang paling banyak diungkapkan dalam website pemerintah daerah. Informasi ini ditampilkan pada laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Tingkat pengungkapan untuk transparansi atas informasi ini mencapai 34%. Pemerintah Daerah Enrekang yang paling transparan dalam mengungkapkan informasi kinerja.

5. Informasi Perencanaan dan Penganggaran

Informasi perencanaan dan penganggaran yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah (Martiningih, 2008). Siklus anggaran dimulai dari perencanaan dan kinerja yang tinggi dapat diperoleh dari perencanaan dan penganggaran yang baik.

Tabel 10 Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Perencanaan dan Penganggaran

	Informasi Perencanaan dan Penganggaran						Jumlah
	5.a.	5.b.	5.c.	5.d.	5.e.	5.f.	
Jumlah Pemda yang Mengungkapkan	7	5	4	4	5	5	30
Tingkat pengungkapan	21%						

Sumber: Data diolah (2012)

Tabel 11 Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Perencanaan dan Penganggaran

No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan	No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan
1	Takalar	100%	11	Sinjai	0%
2	Barru	100%	12	Maros	0%
3	Enrekang	100%	13	Pangkep	0%
4	Sidrap	67%	14	Wajo	0%
5	Luwu Timur	50%	15	Pinrang	0%
6	Parepare	33%	16	Luwu	0%
7	Palopo	33%	17	Tator	0%
8	Selayar	17%	18	Luwu Utara	0%
9	Bantaeng	0%	19	Toraja Utara	0%
10	Gowa	0%	20	Makassar	0%

Visi pemerintah daerah merupakan tujuan jangka panjang pemerintah daerah. Visi ini kemudian dirumuskan menjadi rencana jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun yang dituangkan dalam dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah daerah yang memuat dokumen RPJMD pada website resminya maka akan memberikan informasi perencanaan yang akuntabel. Informasi perencanaan lima tahun ke depan (item 5.a.) ditampilkan sebanyak tujuh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah

daerah menampilkan informasi RPJMD, tidak semuanya membuat RPJMD yang detail sebagaimana yang diminta pada item 5.b sampai 5.f. Hanya Pemerintah Daerah Takalar, Barru, dan Enrekang yang penuh mengungkapkan informasi perencanaan dan penganggaran ini. Tingkat pengungkapan untuk informasi perencanaan dan penganggaran mencapai 21%.

6. Informasi Naratif

Informasi naratif yaitu informasi yang berisi overview operasi pemerintah, deskripsi sebelum laporan

keuangan, laporan pertanggungjawaban kepala pemerintahan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi naratif merupakan

informasi yang mendeskripsikan pemerintah daerah secara umum. Informasi naratif ini memberi penjelasan atas kebijakan atau pelaksanaan aktivitas pemerintah daerah.

Tabel 12. Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Naratif

	Informasi Naratif											Jumlah
	6.a.	6.b.	6.c.	6.d.	6.e.	6.f.	6.g.	6.h.	6.i.	6.j.	6.k.	
Jumlah Pemda yang Mengungkapkan	3	5	1	10	17	15	12	14	14	1	3	95
Tingkat pengungkapan												43%

Sumber: Data diolah (2012)

Tabel 13. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Naratif

No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan	No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan
1	Takalar	91%	11	Parepare	55%
2	Sidrap	82%	12	Palopo	55%
3	Selayar	64%	13	Pangkep	36%
4	Maros	64%	14	Wajo	27%
5	Barru	64%	15	Pinrang	18%
6	Luwu Timur	64%	16	Makassar	18%
7	Bantaeng	55%	17	Tator	9%
8	Gowa	55%	18	Luwu	0%
9	Sinjai	55%	19	Luwu Utara	0%
10	Enrekang	55%	20	Toraja Utara	0%

Sumber: Data Diolah (2012)

Informasi naratif merupakan informasi yang paling banyak diungkapkan pada website resmi pemerintah daerah, yaitu mencapai 43%. Informasi kondisi geografis serta kondisi demografis merupakan informasi yang paling banyak diungkapkan. Kemudian menyusul informasi mengenai ketersediaan infrastruktur dan informasi potensi unggulan daerah, lalu informasi kebijakan pemerintah di bidang investasi, perpajakan, ketenagakerjaan, perbankan, serta kebijakan ekspor impor. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin menampilkan bahwa daerahnya merupakan wilayah yang potensial bagi penanaman modal. Sayangnya pemerintah daerah tidak melengkapinya dengan informasi stabilitas politik (hanya Pemerintah Daerah Takalar yang mengungkapkan)

dan stabilitas keamanan (hanya tiga pemerintah daerah yang mengungkapkan; Pemerintah Daerah Takalar, Sinjai, dan Palopo). Padahal kedua informasi tersebut perlu diketahui oleh investor demi memberi rasa aman atas investasi mereka. Hanya Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang yang mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi, sebab hanya daerah ini yang mengungkapkan secara lengkap laporan keuangannya termasuk Catatan atas Laporan Keuangan (kebijakan akuntansi diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan). Pemerintah Daerah Takalar yang paling banyak mengungkapkan informasi narasi dalam websitenya (sebanyak 91%).

7. Informasi Pajak dan Retribusi Daerah

Informasi pajak dan retribusi daerah adalah informasi yang menjelaskan pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, mulai dari landasan hukumnya hingga pendistribusian hasil pajak dan

retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang semestinya dijadikan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Daerah yang mandiri dapat dilihat dari proporsi pendapatan asli daerah terhadap bantuan yang diperoleh dari pusat.

Tabel 14 Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Pajak dan Retribusi Daerah

	Informasi Pajak dan Retribusi Daerah						Jumlah
	7.a.	7.b.	7.c.	7.d.	7.e.	7.f.	
Jumlah Pemda yang Mengungkapkan	12	8	0	10	10	1	41
Tingkat pengungkapan	34%						

Sumber: Data diolah (2012)

Tabel 15. Transparansi dan Akuntabilitas atas Informasi Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan	No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan
1	Takalar	67%	11	Pangkep	33%
2	Sinjai	67%	12	Tator	33%
3	Barru	67%	13	Wajo	17%
4	Sidrap	67%	14	Makassar	17%
5	Enrekang	67%	15	Bantaeng	0%
6	Luwu Timur	67%	16	Gowa	0%
7	Palopo	67%	17	Pinrang	0%
8	Parepare	50%	18	Luwu	0%
9	Selayar	33%	19	Luwu Utara	0%
10	Maros	33%	20	Toraja Utara	0%

Sumber: Data Diolah (2012)

Hasil atas informasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat pengungkapan 34% dan informasi jenis pajak dan retribusi daerah yang dikumpulkan merupakan informasi yang paling banyak diungkapkan (item 7.a.). Kemudian, informasi anggaran dan realisasi pajak dan retribusi daerah (item 7.d. dan 7.e.). Informasi dasar hukum pengumpulan pajak dan retribusi daerah juga cukup banyak diungkapkan pada website pemerintah daerah (item 7.b.). Tidak ada pemerintah daerah yang memasukkan informasi potensi pajak dan retribusi

daerah (item 7.c.). Selain itu, hanya Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang yang mengungkapkan informasi pendistribusian hasil pajak dan retribusi daerah (item 7.f.).

Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah melalui Website

Tingkat pengungkapan atas masing-masing informasi yang telah diuraikan sebelumnya dapat diringkas sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 16. Tingkat pengungkapan diurutkan dari yang terbesar.

Tabel 16. Tingkat pengungkapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Websitenya

Urutan	Informasi	Tingkat Pengungkapan
1	Informasi naratif	43,2%
2	Informasi kondisi ekonomi	41,1%
3	Informasi pajak dan retribusi daerah	34,2%
4	Informasi kinerja	33,8%
5	Informasi perencanaan dan penganggaran	21,4%
6	Informasi kepatuhan terhadap aturan	13,8%
7	Informasi kondisi keuangan	9,4%
Rata-rata		28,11%

Sumber: Tabel 3 – Tabel 16

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah paling tinggi untuk informasi naratif yaitu sebanyak 43,2% dan paling rendah untuk informasi kondisi keuangan sebanyak 9,4%. Hasil ini sesuai dengan temuan Puspita dan Martani (2012) yang meneliti kandungan isi website seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan menemukan yang tertinggi diungkapkan adalah informasi profil daerah yaitu sebanyak 68,29% dan yang terendah adalah informasi keuangan, hanya 28,40%.

Secara keseluruhan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui website masih tergolong rendah yaitu hanya 28,11% dari keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh investor, kreditur, serta wajib pajak dan retribusi daerah.

Dari seluruh informasi yang dianalisis, informasi yang paling transparan diungkapkan oleh pemerintah daerah ditampilkan pada Tabel 16. Data diurutkan dari yang informasi yang paling banyak diungkapkan.

Tabel 17. Informasi yang Paling Transparan Diungkapkan pada Website Pemerintah Daerah

No.	Item	Informasi	Pemda yang Mengungkapkan
1	6.e.	Kondisi geografis	17
2	2.a.	Nilai dan potensi sumber jasa yang dikelola pemerintah	16
3	6.f.	Kondisi demografis	15
4	6.h.	Ketersediaan infrastruktur	14
4	6.i.	Potensi unggulan daerah	14
5	2.c.	Pertumbuhan produk domestik bruto selama lima tahun	13
6	6.g.	Kebijakan pemerintah di bidang investasi, perpajakan, ketenagakerjaan, perbankan, serta kebijakan bidang ekspor impor	12
6	7.a.	Jenis pajak dan retribusi daerah yang dikumpulkan	12
7	2.h.	Pendapatan per kapita penduduk	11
8	6.d.	Overview operasi pemerintah daerah	10
8	7.d.	Anggaran pajak dan retribusi daerah	10
8	7.e.	Realisasi pajak dan retribusi daerah	10
9	2.g.	Pertumbuhan nilai investasi 5 tahun terakhir	9
9	2.i.	Dampak aktivitas operasional pemerintah daerah terhadap perekonomian	9
9	4.d.	Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemerintah daerah	9
10	4.c.	Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah daerah	8
10	7.b.	Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah	8

Sumber: Data diolah (2012)

Informasi yang paling transparan diungkapkan adalah kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan informasi

yang tidak banyak mengalami perubahan sehingga informasi ini yang paling mudah disiapkan. Pemerintah daerah cukup trans-

paran dan akuntabel dalam menam-pilkan informasi: (1) nilai dan potensi sumber jasa yang dikelola pemerintah, (2) potensi unggulan daerah, dan (3)kebijakan pemerintah di bidang investasi, perpajakan, ketenagakerjaan, perbankan, serta kebijakan bidang ekspor impor, yang mana ketiga informasi ini merupakan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur (Yentifa et al., 2011). Sedangkan bagi wajib pajak dan retribusi daerah, informasi anggaran dan realisasi pajak dan retribusi

daerah, serta dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah cukup transparan diungkapkan oleh pemerintah daerah.

Berikutnya, pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel melalui websitenya dapat dilihat pada Tabel 17. Hasil analisis terhadap sampel diurutkan dari yang paling transparan dan akuntabel hingga yang paling tidak transparan dan tidak akuntabel.

Tabel 18. Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel melalui Websitenya

No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan	No.	Pemerintah Daerah	Tingkat pengungkapan
1	Sidenreng Rappang	77,6%	11	Gowa	26,5%
2	Takalar	69,4%	12	Bantaeng	14,3%
3	Barru	61,2%	13	Pangkep	14,3%
4	Enrekang	55,1%	14	Wajo	12,2%
5	Lutim	53,1%	15	Makassar	12,2%
6	Sinjai	40,8%	16	Pinrang	8,2%
7	Palopo	38,8%	17	Tator	8,2%
8	Parepare	38,8%	18	Luwu	0%
9	Maros	38,8%	19	Luwu Utara	0%
10	Selayar	28,6%	20	Toraja Utara	0%

Sumber: Data Diolah (2012)

Pemerintah daerah yang paling transparan dan akuntabel adalah Sidenreng Rappang yang mengungkapkan informasi sebanyak 77,6% dari total informasi yang dibutuhkan oleh investor, kreditur, serta wajib pajak dan retribusi daerah melalui websitenya. Pemerintah daerah yang tidak transparan dan tidak akuntabel ada tiga, yaitu: Luwu, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Ketiga daerah ini merupakan daerah hasil pemekaran. Tahun 1999, Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi tiga wilayah kabupaten (Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur) dan satu kotamadya (Palopo). Begitu pula Toraja Utara, merupakan daerah pemekaran dari Tana Toraja. Yang mengherankan Kotamadya Makassar justru masuk sebagai daerah yang tidak transparan dan tidak akuntabel dalam mengungkapkan informasinya melalui website. Website Pemerintah Daerah Makassar telah menyediakan menu untuk transparansi pengelolaan anggaran, ada juga menu untuk menampilkan dokumen

publik, seperti ringkasan RKA, ranperda APBD, perda APBD, ringkasan DPA SKPD, laporan realisasi SKPD, dan laporan keuangan Kota Makassar, namun semua informasi tersebut tidak dapat diakses.

PENUTUP

Simpulan

Sebagian besar pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Selatan telah menyiapkan website sebagai media untuk menyampaikan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Informasi yang paling banyak diungkapkan adalah informasi naratif, sebanyak 43,2% dan yang paling sedikit diungkapkan adalah informasi kondisi keuangan, sebanyak 9,4%. Sebanyak 17 pemerintah daerah mengungkapkan informasi kondisi geografis (masuk dalam informasi naratif), sedangkan informasi potensi pajak dan retribusi daerah (masuk dalam informasi

pajak dan retribusi daerah) tidak ada yang mengungkapkan pada websitenya. Dari 20 pemerintah daerah yang dianalisis, Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang yang tingkat transparansi dan akuntabilitasnya paling tinggi yaitu mencapai 77,6% sedangkan Pemerintah Daerah Luwu, Luwu Utara, dan Toraja Utara tingkat transparansi dan akuntabilitasnya 0%. Secara keseluruhan, tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan melalui website resminya masih rendah yaitu baru mencapai 28,11%.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya melihat pengungkapan informasi untuk investor, kreditur, serta wajib pajak dan retribusi daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya tingkat pengungkapan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan media website, yang pada saat penelitian ini dilakukan, menyajikan informasi sebagaimana yang telah disampaikan pada hasil penelitian. Kemungkinan besar pihak pengelola website dapat memasukkan informasi yang lebih baru atau telah menyelesaikan perbaikan atas menu yang pada saat penelitian ini dilakukan, tidak dapat diakses.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah masih rendah, mengingat bahwa penyediaan informasi melalui website bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Setiap selesai satu tahun anggaran, maka pemerintah daerah diperiksa oleh BPK, dan semua laporan yang dibutuhkan untuk mendapat opini dari BPK harus disiapkan secara lengkap disertai dengan pengungkapan yang memadai. Begitu pula saat akan memasuki tahun anggaran yang baru maka pemerintah daerah harus menyusun

anggaran yang jelas dan terukur. Alangkah transparan dan akuntabelnya pemerintah daerah jika informasi yang memang sudah tersedia tersebut dapat juga diakses oleh masyarakat secara luas melalui website resmi pemerintah daerah. Selain pemerintah daerah mendapat citra yang baik atas transparansi dan akuntabilitasnya, pemerintah daerah juga dapat mengundang masuk investor sehingga terjalin sinergi untuk pembangunan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana Spica, 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela “*Internet Financial and Sustainability Reporting*”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 12 No. 2 Desember.
- Anggrahini, Meilyna Diah; Rochayanti, Christina; dan Sosiawan, Edwi Arif, 2008. Peran Humas Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Pengelolaan Isi Informasi Website Pemda sebagai Media Communications Relations dengan Masyarakat, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus.
- Elfianti, Lis, 2011. Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung, Tesis Universitas Andalas.
- Fitri, Sri Adelia, 2011. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat), Tesis Universitas Andalas.
- Kristina, S, 2005. Analisis Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di

- Kabupaten Sragen, Spirit Publik Vol. 1 No. 2 Oktober.
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martiningsih, RR. Sri Pancawati, 2008. Analisis Kebutuhan Informasi Pemerintahan: Studi Pelaporan Keuangan Pemerintah, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- _____, 2012. Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi, 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda, Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Riduwan, 2011. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung.
- Sigit, Djoko, 2010. Penggunaan Internet Sebagai Media Pelaporan Informasi Keuangan : Survey Terhadap Home Page Perusahaan-Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Jakarta.
- Sekaran, Uma, 2009. Research Methods for Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Buku 1 Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2006. Research Methods for Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Buku 2 Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Suwardjono, 2006. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Yentifa, Armel; Yurniawati; dan Suhandi, 2010. Kebutuhan Investor dan Kreditur atas Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- www.bpk.go.id/web/files/2011/05/21-SuaraPembaruan.pdf
- *) Penulis adalah Dosen DPK pada STIE Nobel Indonesia Makassar*